

**Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money*
Pada Dinas Kesehatan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara**

Izmi Khairunnisa

NPP. 31.0066

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: khairunisaizmi8@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Marthalina, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The performance of regional apparatus organizations can be evaluated using the Value For Money concept which is seen in three aspects, namely economics, efficiency and effectiveness. The financial performance of a regional organization can be seen in the use of the APBD. This research focuses on the problem of less than optimal financial performance in each program of the Medan City Health Service. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the financial performance of the Medan City Health Service using the Value For Money concept. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods and financial performance analysis using the Value For Money concept according to Mardiasmo. This research is expected to provide an objective picture of the Financial Performance of the Medan City Health Service. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with 3 informants and documentation. **Result:** The findings with the analysis carried out on financial performance using the value for money concept, the Medan City Health Service has allocated the budget economically and efficiently for each work program. However, the program implemented was deemed ineffective in its implementation and use of its budget. **Conclusion:** The Medan City Health Service has allocated a budget that is used economically and efficiently for each work program implemented. The implementation and use of the budget is not effective. The implementation of the work program at the Medan City Health Service contains various obstacles. The budget absorbed is not yet optimal. Lack of public awareness in implementing the program and awareness of health workers regarding the SOPs set by the government as well as a lack of supervision carried out by the program implementing apparatus for each program implemented. The efforts made to overcome obstacles are by evaluating the policies in each program so that they are more targeted by following economic, efficient and effective principles. Carrying out training and outreach to related human resources. As well as increasing supervision over the implementation and use of budgets for each program at the Medan City Health Service

Keywords: *Budgeting, Financial Performance, Value for Money*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja pada organisasi perangkat daerah dapat dievaluasi menggunakan konsep *Value For Money* yang dilihat pada tiga aspek yakni ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Kinerja keuangan dari suatu organisasi perangkat daerah terlihat dalam penggunaan APBD. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kurang optimalnya kinerja keuangan pada setiap program Dinas Kesehatan Kota Medan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan menggunakan konsep *Value For Money*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisis kinerja keuangan menggunakan konsep *Value For Money* menurut Mardiasmo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif dalam Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 3 informan, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Sesuai dengan analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money*, Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengalokasikan anggaran secara ekonomis dan efisien pada setiap program kerja. Namun program yang dilaksanakan dinilai tidak efektif dalam pelaksanaan serta penggunaan anggarannya. **Kesimpulan:** Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengalokasikan anggaran yang digunakan secara ekonomis dan efisien pada setiap program kerja yang dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaan serta penggunaan anggaran tidak efektif. Pelaksanaan program kerja pada Dinas Kesehatan Kota Medan terdapat berbagai hambatan. Anggaran yang terserap belum secara optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program dan kesadaran dari tenaga kesehatan tentang SOP yang ditetapkan oleh pemerintah serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pelaksana program pada setiap program yang dilaksanakan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan mengevaluasi kebijakan pada setiap program agar lebih tepat sasaran dengan mengikuti asas ekonomis, efisien dan efektif. Melakukan pelatihan serta sosialisasi pada sumber daya manusia yang terkait. Serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan serta penggunaan anggaran pada setiap program pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

Kata kunci: Penganggaran, Kinerja Keuangan, *Value For Money*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar di Indonesia tetapi prospek kualitas kesehatan di Indonesia tergantung pada peran pemerintah dalam hal menyediakan kebutuhan dan layanan kesehatan termasuk pengelolaan anggaran. Desentralisasi menjadi salah satu contoh kebijakan yang dilimpahkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam mengurus persoalan kesehatan yang ada di tiap-tiap daerah dimana arah kebijakannya segaris dengan pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, aturan ini memberikan hak kepada daerah agar secara mandiri mengelola keuangan baik yang bersumber dari pusat ataupun pendapatan dari daerah itu sendiri mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban yang menghasilkan output berupa aturan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah sendiri memerlukan sistem agar dana yang diberikan pemerintah pusat menjadi transparan, akuntabel serta memberikan dampak yang ekonomis, efisiensi dan efektif yang dapat dilakukan penilaian melalui penggunaan konsep *Value For Money*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membawahi dasar aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi pada tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Otonomi Daerah memiliki arti dimana setiap pemerintah daerah berhak mengatur secara mandiri segala urusan pemerintahan yang berada di luar urusan pemerintahan pusat. Menurut Suharizal Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah (Suharizal, 2017). Oleh karena itu, masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam memberikan segala bentuk pelayanan baik pemberdayaan, peningkatan peran, sarana dan prasarana dalam membangun serta menciptakan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.

Penggunaan APBD pada organisasi perangkat daerah menjadi salah satu indikator penilaian kinerja keuangan pada organisasi tersebut. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan (Halim, 2008). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis. Laporan ini juga digunakan dalam menilai kinerja keuangan yang dilakukan menggunakan konsep *Value For Money*.

Konsep *value for money* dikenal sebagai konsep 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas), mengukur dengan cara analisis varian yaitu membandingkan antar *input* dan *output* aktualnya (Mardiasmo, 2009). *Value for money* menjadi penilaian terhadap nilai uang dan menjadi inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan daerah. Bastian (2010) mendeskripsikan *value for money* sebagai konsep yang tersusun atas penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam mengukur kinerja.

Pada pengukuran ekonomis dilakukan dengan membandingkan input dengan nilai rupiah untuk melihat nilai ekonomis dari anggaran tersebut. *Input* secara teori adalah realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan. Ekonomis juga disebut sebagai kehematan yang mencakup pengelolaan

secara waspada atau cermat serta tidak terjadi pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi biaya yang tidak perlu.

Efisiensi dapat diukur menggunakan rasio antara *output* dengan *input*. Pengukuran efisiensi belanja yang termasuk *input* adalah realisasi belanja langsung dan *output* adalah realisasi anggaran belanja. Indikator efisiensi dapat digambarkan dengan adanya keterkaitan antara input sumber daya oleh organisasi (contohnya; pegawai, penerimaan, pembiayaan) dengan output yang diciptakan (Mahmudi, 2005).

Efektivitas dapat digambarkan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas juga merupakan hubungan antara *output* dengan *outcome* (tujuan), semakin besar kontribusi *output* maka semakin efektif program pada organisasi tersebut. Dengan kata lain aspek efektivitas menjelaskan jangkauan akibat dan pengaruh (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai target program.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu Dalam pelaksanaannya khususnya pada Instansi Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan masih ditemukan adanya permasalahan seperti yang dilansir oleh (sumutpos.co) yang dirilis pada tahun 2022 disebutkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang ada di Kota Medan yang membuat pengaduan tentang pelayanan kesehatan yang dinilai kurang optimal. Dilansir oleh salah satu berita elektronik yaitu (poskotasumut) tahun 2022 disebutkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan dipertanyakan dikarenakan meningkatnya kasus stunting di Kota Medan. Dalam pelaporan hasil kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Medan mengalami peningkatan. Anggaran yang diberikan pada Dinas Kesehatan Kota Medan telah digunakan dengan semestinya.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa persentase kinerja pada setiap programnya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dalam anggaran yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan serta penggunaannya yang digunakan sesuai dengan anggaran yang diberikan. Pada realita dilapangan dalam program stunting tahun 2022 di Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021, namun pada hasil laporan kinerja mengalami peningkatan tetapi pada laporan realisasi anggaran pada program tersebut mengalami penurunan.

Adanya permasalahan yang terjadi di lapangan serta hasil kinerja yang dilaporkan maka dilakukannya penelitian serta menganalisis tentang kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan dalam melaksanakan setiap program yang direncanakan. Dalam pelaksanaan setiap programnya ditemukan adanya hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Wadirman Zain dengan judul Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kota Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% yaitu 93,91%. Dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 96,85%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata

rasio efektivitas dari tahun 2012-2016 yaitu 96,05% yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012- 2016 tidak efektif (wadirman zain, 2020). Penelitian I Made Marayasa dan I Ketut Jati dengan judul Penilaian Kinerja Pemerintahan Berdasarkan konsep Value For Money Untuk Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Buleleng. Hasil Penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan pemerataan (equality), kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata (I Made, Marayasa, I Ketut, Jati, 2013). Penelitian Nur Zeni Amalia Putri yang berjudul Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sangat baik, kecuali pada program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan yang dikategorikan baik. Sama halnya dengan tahun 2017 sangat baik, kecuali pada program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan yang dikategorikan baik. Sedangkan, pada tahun 2018 hanya program perbaikan gizi yang sangat baik. Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada penggunaan anggaran dari tahun 2016 hingga 2018 dinyatakan efisien karena capaian kerjanya lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran (Nur Zeni, A.P, 2020). Penelitian Nindy Cahya Feriska Sari berjudul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money*. Penelitian ini menjelaskan tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui analisis pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada periode tahun 2010-2013 (Sari, Nindy C. F, 2014). Penelitian Nur Awalia Reski dan Darmawati dan Andi Kusumawati berjudul *Performance Measurement Using Value For Money Concept in Village Government*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja pemerintahan Desa Jabal Nur dapat dikatakan cukup ekonomis pemerintah cukup baik dalam mengendalikan biaya karena pemerintah tidak pernah mengeluarkan dana lebih dari yang dianggarkan. Pengukuran kinerja Pemerintah Desa Jabal Nur berdasarkan konsep *value for money* diperoleh rasio efisiensi dikatakan efisien. kinerja pemerintahan Desa Jabal Nur dapat dikatakan efektif meskipun rasio persentasenya mengalami penurunan pada tahun 2017 (Reski.N.A, Dharmawati, Kusumawati,A, 2020). Penelitian Dejan Milenkovic Vladimir berjudul *Value for money in public-private Partnership projects in the field of street lighting in the republic of Serbia*. Hasil penelitian ini ialah metodologi *value for money* pada proyek penerangan jalan melalui fakta-fakta berikut: masyarakat mendapatkan penerangan umum yang lebih baik dan berkualitas, proyek-proyek ini memberikan perbaikan dan perlindungan lingkungan, pelaksanaan proyek-proyek ini meningkatkan efisiensi energi di sektor publik. Dengan menerapkan metodologi *value for money*, penelitian ini juga telah membuktikan justifikasi ekonomi (kuantitatif) penerapannya bagi pemerintah kota (Dejan Milenkovic, V, 2020). Penelitian penelitian kurnia anggraini yang berjudul Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) di Kota Surabaya dikategorikan tidak ekonomis, efisien, dan efektif (Anggraini. K, 2021). Penelitian Mukminati Ridwan dan Anggrawati pada tahun 2017 yang berjudul Konsep *Value For Money*: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur yang menghasilkan bahwa

Kinerja Dinas PU Kabupaten Luwu Timur belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan program yang dijalankan sudah ekonomis dan efisien namun tidak berjalan secara efektif (Ridwan.M, 2017)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus menganalisis kinerja keuangan pada program kerja yang ditetapkan di lokasi Dinas Kesehatan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Metode penelitian yang digunakan berbeda karena penulis memakai Metode kualitatif.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Medan melalui konsep *Value For Money*. Untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan melalui konsep *Value For Money*. Untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya berdasarkan konsep *value for money*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Kothari bahwa penelitian deskriptif mencakup survey pertanyaan dan pertanyaan pencarian fakta dari berbagai jenis. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah deskripsi keadaan yang ada saat ini (Kothari,2004).

Penulis mengumpulkan data melalui data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini dan juga hasil dari observasi dan pengamatan yang dilaksanakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Medan dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan. Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas kesehatan Kota Medan dianalisis menggunakan konsep *value for money* yang dinilai berdasarkan aspek efisiensi, ekonomis dan efektivitas (Mardiasmo,2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis data pada tahun 2020-2023 dan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan sesuai dengan program kerja yang menjadi sasaran penelitian ini pada Dinas Kesehatan Kota Medan dengan menggunakan konsep *Value For Money* sehingga dalam pelaksanaan anggaran setiap program kerja yang dilaksanakan dapat diterapkan sesuai dengan prinsip value for money yakni ekonomi, efisien dan efektif. Pada penelitian ini diuraikan serta menganalisis setiap data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, observasi terkait dokumen pendukung dalam penelitian ini.

3.1. Ekonomis

Aspek Ekonomis memiliki dimensi yaitu pengalokasian anggaran yang dilakukan secara hemat. Pengalokasian anggaran secara hemat yaitu anggaran yang digunakan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran pada setiap program kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kota Medan. Pada aspek ekonomis dapat dilihat melalui realisasi anggaran pada setiap program kerja. Berikut persamaan untuk mengukur tingkat ekonomis:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika diperoleh nilai 0 sampai dengan 40% (0-40%) berarti tidak ekonomis
2. Jika diperoleh nilai 41% sampai dengan 70% (41-70%) berarti cukup ekonomis
3. Jika diperoleh nilai 71% sampai dengan 100% (71-100%) berarti ekonomis

Tabel 1

Ketercapaian Ekonomis Pada Setiap Program Dinas Kesehatan Tahun 2020-2023

No	Program	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	2020	145.852.076.783	137.430.872.235	94,22	Ekonomis
		2021	167.999.591.200	162.580.024.600	96,77	Ekonomis
		2022	208.344.348.230	198.283.940.510	95,17	Ekonomis
		2023	105.852.176.078	97.309.919.008	91,93	Ekonomis
2	Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	2020	1.403.807.061	1.401.517.561	99,83	Ekonomis
		2021	1.346.667.030	1.265.142.200	93,94	Ekonomis
		2022	2.420.116.000	1.156.320.600	47,77	Cukup Ekonomis
		2023	1.600.000.000	1.440.073.620	90,00	Ekonomis
3	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	2020	4.000.000.000	2.957.568.000	73,93	Cukup Ekonomis
		2021	4.000.000.000	3.529.140.573	88,22	Ekonomis
		2022	5.352.389.550	2.650.666.459	49,52	Cukup Ekonomis
		2023	8.335.645.204	6.520.023.087	78,21	Ekonomis
Jumlah			655.158.150.106	616.525.208.453	94,10	Ekonomis

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2020-2023 (diolah penulis)

Pada **Tabel 1** menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan khususnya pada program meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan periode 2020-2023 dikategorikan ekonomis, namun pada program meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat periode 2022 dikategorikan cukup ekonomis, dan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan periode 2022 dikategorikan sudah cukup ekonomis. Dari hasil analisis serta penilaian yang dilakukan menggunakan konsep *value for money* kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan dikategorikan ekonomis. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan mengatakan “Setiap program di Dinas Kesehatan Kota Medan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kemudian kami melakukan pendataan terkait biaya yang dikeluarkan untuk setiap program, termasuk biaya operasional, biaya personil, dan biaya lainnya, harus dikumpulkan. Setelah data biaya dan manfaat terkumpul, dilakukan analisis untuk mengevaluasi perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh dari setiap program. Analisis ini membantu dalam menentukan apakah investasi yang dilakukan dalam suatu program memberikan nilai tambah yang memadai bagi masyarakat”.

3.2. Efisiensi

Penilaian yang dilakukan pada aspek efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per input*. Pengukuran dalam memperoleh efisiensi terlihat dalam persamaan berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika diperoleh nilai 0 sampai dengan 40% (0-40%) berarti tidak efisien
2. Jika diperoleh nilai 41% sampai dengan 70% (41-70%) berarti cukup efisien
3. Jika diperoleh nilai 71% sampai dengan 100% (71-100%) berarti efisien

Tabel 2

No	Program	Tahun	Output	Input	Hasil (%)	Kategori
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	2020	145.852.076.783	137.430.872.235	94,22	Efisien
		2021	167.999.591.200	162.580.024.600	96,77	Efisien
		2022	208.344.348.230	198.283.940.510	95,17	Efisien
		2023	105.852.176.078	97.309.919.008	91,93	Efisien
2	Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	2020	1.403.807.061	1.401.517.561	99,83	Efisien
		2021	1.346.667.030	1.265.142.200	93,94	Efisien
		2022	2.420.116.000	1.156.320.600	47,77	Cukup Efisien
		2023	1.600.000.000	1.440.073.620	90,00	Efisien
3		2020	4.000.000.000	2.957.568.000	73,93	Cukup Efisien

	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	2021	4.000.000.000	3.529.140.573	88,22	Efisien
		2022	5.352.389.550	2.650.666.459	49,52	Cukup Efisien
		2023	8.335.645.204	6.520.023.087	78,21	Efisien
	Jumlah		655.158.150.106	616.525.208.453	94,10	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2020-2023 (diolah penulis)

Secara keseluruhan program yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan telah berjalan efisien yang dinilai menggunakan konsep *value for money*. Namun jika dilihat dari setiap indikator kinerja dalam melaksanakan program yang dilakukan masih ada kategori cukup efisien yaitu pada program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatkan status dan gizi masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan yang ada Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya guna kinerja yang dihasilkan dapat dikatakan efisien. Salah satunya pada program kerja meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Medan berupaya untuk melakukan akreditasi pada setiap puskesmas yang ada di Kota Medan. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan bahwa “Dinas Kesehatan berupaya mempercepat pengakreditasi setiap puskesmas yang ada di Kota Medan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan puskesmas yang telah diakreditasi dapat memberikan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan rujukan lebih lanjut dalam penanganan kesehatan”.

3.3. Efektivitas

Efektivitas ialah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada aspek efektivitas dinilai dengan cara apakah suatu program telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan perbandingan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka dikategorikan efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektif berimbang
3. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif

Tabel 3.

No	Program	Tahun	Outcome	Output	Hasil (%)	Kategori
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	2020	182,77	195,00	93,72	Tidak Efektif
		2021	176,20	180,00	97,88	Tidak Efektif
		2022	196,13	185,00	106,01	Efektif
		2023	198,12	190,00	104,27	Efektif
2	Meningkatkan Status	2020	55,06	125,00	44,04	Tidak Efektif
		2021	76,00	140,00	54,28	Tidak Efektif
		2022	131,89	150,00	87,92	Tidak Efektif

	Kesehatan dan Gizi Masyarakat	2023	172,29	172,85	99,67	Tidak Efektif
3	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	2020	120,00	150,00	80,00	Tidak Efektif
		2021	145,00	175,00	82,85	Tidak Efektif
		2022	159,55	165,00	96,69	Tidak Efektif
		2023	187,33	190,00	98,59	Tidak Efektif
	Hasil		1800,34	2017,85	89,22	Tidak Efektif

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2020-2023 (diolah penulis)

Dari hasil analisis dan penilaian yang dilakukan pada aspek efektivitas menggunakan konsep *value for money* menunjukkan bahwa program yang dilakukan pada Dinas Kesehatan dinilai tidak efektif hal ini dihasilkan melalui perhitungan persentase outcome dengan output pada program yang dilaksanakan. Nilai yang didapatkan yaitu senilai 89,22% dalam kategori penilaian aspek efektivitas apabila hasil dibawah 100% maka dikatakan tidak efektif. Program yang dilaksanakan tidak efektif disebabkan kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam melaksanakan program tersebut. Tanpa pemantauan yang cermat terhadap pelaksanaan dan hasil program, sulit bagi pemerintah untuk mengetahui apakah program tersebut efektif atau tidak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja keuangan yang dihasilkan dalam pelaksanaan setiap program pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Pelaksanaan Analisis kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Medan dapat melihat apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan ekonomis, efisien, efektif. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan hemat. Dalam melakukan penganggaran diperlukannya sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada program yang akan dijalankan, sehingga dapat ditentukan anggaran yang dibutuhkan tanpa terjadinya pemborosan maupun anggaran yang digunakan tidak terserap secara efektif. Sama halnya dengan temuan Penelitian Nur Zeni Amalia Putri yang berjudul Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa dalam pengelolaam kinerja keuangan agar efektif diperlukannya masukan dengan kualitas dan kuantitas pada harga terendah, memperoleh keluaran yang maksimal pada masukan tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai target, dan dapat memperoleh pencapaian hasil program/kegiatan pada target yang telah ditentukan (Nur Zeni, A.P, 2020).

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan yang terjadi di lapangan masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi evaluasi terhadap program yang dilaksanakan tidak berjalan secara efektif. Layaknya temuan Mukminati Ridwan dan Anggrawati pada tahun 2017 yang berjudul Konsep *Value For Money*: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur yang menyatakan bahwa Meskipun output yang dihasilkan sudah mencapai target yang maksimal yaitu 100%. Akan tetapi tingkat pencapaian outcome dari program pembangunan jalan dan jembatan secara umum belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah atau dengan kata lain belum

memuaskan publik atau pelanggan secara maksimal sehingga program yang dilaksanakan dikatakan tidak efektif (Ridwan. Mukminati, 2017). Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Medan telah menggunakan anggaran secara ekonomis, hal ini terlihat pada penggunaan anggaran dalam melaksanakan program dilakukan dengan hemat dan biaya yang direalisasikan lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Lain halnya dengan penelitian kurnia anggraini yang berjudul Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya yang menyatakan bahwa rasio yang didapatkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) di Kota Surabaya sebesar 95,70% yang artinya termasuk kedalam kategori kurang ekonomis hal ini terjadi dikarenakan dalam penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum berhasil untuk menekan biaya-biaya yang diperlukan, walaupun biaya yang terealisasi lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Anggraini,Kurnia, 2021)

IV. KESIMPULAN

Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* pada Dinas Kesehatan Kota Medan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan telah melakukan pengalokasian anggaran secara ekonomis pada setiap program yang dilaksanakan. Pada aspek efisien setiap program yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Medan masih ada program yang belum terlaksana dengan baik sehingga masih dikategorikan belum efisien. Pada aspek efektivitas program yang dilaksanakan juga dikategorikan tidak efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, K. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya. *Jurnal Sustainable*, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/1153/1002>.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Marayasa, I Made. (2017). *Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/29969/19373>.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Mukminati, Ridwan. (2017). *Konsep Value For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, <https://doi.org/10.24252/.v7i1.3936>
- Reski Nur, Darmawati, Kusumawati Andi. (2020). *Performance Measurement Using Value For Money Concept in Village Government*. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, <https://doi.org/10.37888/bjra.v4i1.247>.
- Sari, Nindy C. F. (2014). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)*. *Jurnal Akuntansi*, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/download/11224/4355>.
- Suharizal. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, <http://vladimir.dejan>.
- Vladimir, Dejan. (2020). *Value For Money In Public-Private Partnership Projects In The Field Of Street Lighting In The Republic Of Serbia*. *Economy and Market Communication Review*, <http://doisrpska.nub.rs/index.php/economyandmarket/article/download/6983/6809/14485>.
- Zain, Wardiman. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makasar*, <http://eprints-unm-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/eprints.unm.ac.id/10474/1/Jurnal%20Skripsi.pdf>.
- Zeni, Nur, A.P. (2020). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, http://Nur%20Zeni%20Amilia%20Putri_G72215020.pdf.